



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 32 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan instansi masing-masing;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun

2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Gresik untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 6 September 2013

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 6 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1243

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR : 32 Tahun 2013  
 TAHUN : 2013

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
1	Pendidikan	1 Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ketercukupan lembaga PAUD	Dinas Pendidikan
		2 Jumlah Anak Usia Dini (3 th - 6 th) yang sekolah	Masih adanya Anak Usia Dini yang belum masuk PAUD	Dinas Pendidikan
		3 Jumlah Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ketercukupan tenaga pengajar PAUD	Dinas Pendidikan
		4 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Wajib Belajar 12 Tahun (SD s/d SLTA)	Masih adanya anak usia wajib belajar 12 tahun yang tidak sekolah	Dinas Pendidikan
		5 Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) Wajib Belajar 12 Tahun (SD s/d SLTA)	Masih adanya angka putus sekolah pada usia wajib belajar 12 tahun	Dinas Pendidikan
		6 Meningkatnya Angka Kelulusan (AL) Wajib Belajar 12 Tahun (SD s/d SLTA)	Masih adanya peserta didik wajib belajar 12 tahun yang tidak lulus	Dinas Pendidikan
		7 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Kebutuhan akan data siswa SD yang akan melanjutkan	Dinas Pendidikan
		8 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Kebutuhan akan data kelulusan pada Tingkat SMA	Dinas Pendidikan
		9 Jumlah Lembaga Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun yang layak	Ketercukupan lembaga penyelenggara pendidikan wajib belajar 12 Tahun	
		10 Jumlah Guru yang memenuhi standar kompetensi per mata pelajaran pada Tingkat Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Masih adanya guru yang belum memenuhi standar kompetensi	Dinas Pendidikan
		11 Proporsi APBD terhadap pendidikan	Ketersediaan anggaran pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1 Rasio tenaga kesehatan	Ketercukupan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUD
		2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar	Meningkatkan standar kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan / RSUD
		3 Cakupan ketercukupan obat-obatan pelayanan dasar	Ketercukupan obat untuk pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan / RSUD
		4 Penurunan jumlah penderita penyakit Menular	Masih adanya penderita penyakit menular	Dinas Kesehatan / RSUD
		5 Cakupan kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatkan standar kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan / RSUD

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
		6 Jumlah RS yang dikelola Pemerintah Daerah	Mendekatkan penanganan pasien kesehatan lanjutan	Dinas Kesehatan / RSUD
		7 Cakupan pelayanan kesehatan lanjutan	Masih adanya pasien yang belum mendapatkan <u>penanganan kesehatan lanjutan</u>	Dinas Kesehatan / RSUD
3	Lingkungan Hidup	1 Ketercukupan Penanganan dan Pengelolaan Persampahan	Masih kurangnya sarana prasarana persampahan	Badan Lingkungan Hidup
		2 Meningkatnya Kualitas Udara	Masih rendahnya kualitas udara	Badan Lingkungan Hidup
		3 Rasio Ruang Terbuka Hijau	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau	Badan Lingkungan Hidup
		4 Meningkatnya luas kawasan lindung	Perlunya dilakukan konservasi lingkungan	Badan Lingkungan Hidup
		5 Tersedianya sarana pengelolaan limbah	Kurangnya sarana pengelolaan limbah	Badan Lingkungan Hidup
		6 Jumlah Taman Kota	Kurangnya jumlah taman kota	Badan Lingkungan Hidup
4	Pekerjaan Umum	1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Perlunya Pemeliharaan jalan agar dlm kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Perlunya Pemeliharaan jembatan agar dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
		3 Panjang Jalan Poros Desa Yang Terbangun	Peningkatan akses dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum
		4 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Menjaga kesinambungan produktivitas pertanian	Dinas Pekerjaan Umum
		5 Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	Mengurangi genangan air	Dinas Pekerjaan Umum
		6 Ketersediaan Air Baku	Tercukupinya air baku	Dinas Pekerjaan Umum
5	Penataan Ruang	1 Keberadaan Perda RT / RW	Pengendalian pengembangan wilayah	Bappelitbangda
		2 Ketersediaan Kawasan	Terbentuknya sentra - sentra sesuai peruntukan	Bappelitbangda
		3 Tersusunnya RDTR	Pengendalian pemanfaatan tata ruang	Bappelitbangda
		4 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pemanfaatan tata ruang	Bappelitbangda
6	Perencanaan Pembangunan	1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang sinergis (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA PPAS)	Diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis	Bappelitbangda
7	Perumahan	1 Ketersediaan Fasos, Fasum	Pengendalian pengembangan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Berkurangnya Luas Lingkungan pemukiman kumuh	Tersedianya rumah layak huni	Dinas Pekerjaan Umum
		3 Ketersediaan Air Bersih	Tercukupinya air bersih	Dinas Pekerjaan Umum
		4 Meningkatnya Rumah layak huni	Terwujudnya Tempat Hunian Sehat	Dinas Pekerjaan Umum

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
8	Kepemudaan dan Olahraga	1 Meningkatnya Jumlah Pemuda Produktif	Tumbuhnya kewirausahaan pemuda	Disbudparpora
		2 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Pembinaan dan peningkatan peran serta pemuda	Disbudparpora
		3 Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Tercukupinya sarana dan prasarana olahraga	Disbudparpora
		4 Jumlah cabang olahraga yang dibina	Meningkatnya jumlah atlet	Disbudparpora
		5 Meningkatnya Prestasi Olahraga	Mengukur keberhasilan pembinaan cabang olahraga	Disbudparpora
9	Penanaman Modal	1 Meningkatnya Angka Investasi	Mengetahui pertumbuhan investasi daerah	BPMP
		2 Jumlah Ijin Investasi yang terlayani	Mengetahui jumlah dan jenis investasi	BPMP
10	Koperasi dan UKM	1 Jumlah Koperasi Aktif	Mengetahui jumlah koperasi yang sehat	Diskoperindag UKM
		2 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Mengetahui jumlah dan jenis Usaha Mikro dan Kecil	Diskoperindag UKM
11	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil
		2 Jumlah Dokumen Pencatatan sipil yang diterbitkan	Tertib Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil
12	Ketenagakerjaan	1 Menurunnya angka pengangguran	Mengetahui angkatan kerja yang telah bekerja	Dinas Tenaga Kerja
		2 Menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial	Mengetahui tingkat kondusifitas usaha	Dinas Tenaga Kerja
		3 Jumlah Penyelenggaraan Bursa Kerja	Untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja	Dinas Tenaga Kerja
		4 Meningkatnya angka K3	Mengetahui jumlah industri yg mematuhi persyaratan K3	Dinas Tenaga Kerja
13	Ketahanan Pangan	1 Regulasi ketahanan pangan	Mengetahui ada tidaknya regulasi terkait ketahanan pangan daerah	Kantor Ketahanan Pangan
		2 Ketersediaan pangan	Mengetahui ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhannya	Kantor Ketahanan Pangan
		3 Rata-rata konsumsi bahan pangan utama	Mengetahui tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan utama	Kantor Ketahanan Pangan
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	Mengetahui kinerja pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kantor KBPP
		2 Jumlah KDRT yang tertangani	Mengetahui jumlah KDRT yang terjadi	Kantor KBPP
		3 Angka Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Mengetahui proporsi dan keseimbangan peran perempuan dalam pembangunan	Kantor KBPP / Kantor PMD

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1 Menurunnya angka pertumbuhan penduduk	Mengetahui keberhasilan pelaksanaan program KB	Kantor KBPP
		2 Jumlah Advokasi kependudukan	Mengetahui tingkat efektivitas penyuluhan KB	Kantor KBPP
16	Perhubungan	1 Terbangunnya keterhubungan antar moda	Ketersediaan moda terhadap pengguna moda	Dinas Perhubungan
		2 Ketersediaan Sarana Angkutan	Ketercukupan sarana angkutan	Dinas Perhubungan
17	Komunikasi dan Informatika	1 Keberadaan Cyber City dan Cyber Community	Peningkatan akses dan arus informasi dan komunikasi	Bagian PDTI
		2 Tertatanya Sarana Prasarana Komunikasi	Ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana komunikasi	Bagian PDTI
18	Pertanahan	1 Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Perlunya Penyelesaian pengelolaan pertanahan	Bagian Adm. Pemerintahan
		2 Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang tersertifikasi	Jumlah Aset Tanah yang tersertifikasi	Bagian Adm. Pemerintahan
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1 Harmonisasi Kesepakatan Bersama Instansi Terkait	Mengetahui permasalahan dan hambatan penyelenggaraan pemerintah daerah	Kantor KesbangLinmas
		2 Tersampainya Deteksi Dini Potensi Konflik kepada pihak terkait	Kecepatan penanganan konflik di daerah	Kantor KesbangLinmas
		3 Fasilitasi dan Advokasi Penegakan HAM	Keberpihakan pemerintah terhadap penegakan HAM	Kantor KesbangLinmas
		4 Peningkatan Pemantapan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan	Menumbuhkan jiwa patriotisme	Kantor KesbangLinmas
		5 Terwujudnya Stabilitas Politik Daerah	Menjaga stabilitas politik daerah	Kantor KesbangLinmas
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1 Jumlah Ranperda yg ditetapkan menjadi Perda	Mendorong pengembangan produk hukum daerah	Bagian Hukum
		2 Jumlah Perda yang dibatalkan	Adanya perda yang dibatalkan	Bagian Hukum
		3 Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan	Peraturan Bupati yang ditetapkan	Bagian Hukum
		4 Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan	Keputusan Bupati yang ditetapkan	Bagian Hukum
		5 Jumlah Naskah Perjanjian yang dibuat	Naskah Perjanjian yang dibuat	Bagian Hukum
		6 Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Beberapa rekomendasi atas temuan yang perlu ditindaklanjuti	Inspektorat Kabupaten
		7 Jumlah Review yang dilaksanakan	Review yang dilaksanakan	Inspektorat Kabupaten
		8 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	Laporan Pertanggungjawaban yang tersusun tepat waktu	DPPKAD, Ortala, Bappelitbangda, Bag. Adm Pemerintahan
		9 Opini laporan keuangan	Opini atas laporan keuangan daerah	DPPKAD
		10 Laporan keuangan tersusun tepat waktu	Perlunya laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	DPPKAD
		11 APBD ditetapkan tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu	DPPKAD

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
		12 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan	Regulasi keuangan daerah yang sesuai	DPPKAD
		13 Peningkatan PAD	Adanya peningkatan PAD	DPPKAD
		14 Keberadaan kemandirian daerah	Perlu adanya kemandirian daerah	DPPKAD
		15 Pembinaan Perusahaan Daerah	Terpantaunya kondisi perusahaan daerah	Bag. Adm Perekonomian
		16 Pemanfaatan Aset Daerah	Inventarisasi dan pemanfaatan aset	DPPKAD, Bag. Perlengkapan
		17 Jumlah Sidang DPRD dalam setahun	Mengetahui jumlah sidang DPRD	Sekretariat DPRD
		18 Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan ranperda	Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Sekretariat DPRD
		19 Jumlah Perda inisiatif DPRD	Mengetahui jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif	Sekretariat DPRD
		20 Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya	Mengetahui jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya	Badan Kepegawaian Daerah
		21 Rasio jabatan yang terisi	Mengetahui jumlah jabatan yang terisi	Badan Kepegawaian Daerah
		22 Jumlah Diklat Fungsional yang dilaksanakan	Mengetahui jumlah diklat fungsional	Badan Kepegawaian Daerah
		23 Jumlah Diklat Struktural yang dilaksanakan	Mengetahui jumlah diklat struktural	Badan Kepegawaian Daerah
		24 Rasio Kebutuhan Pegawai dibandingkan formasi yang tersedia	Mengetahui kebutuhan pegawai	Badan Kepegawaian Daerah
		25 Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK	Mengetahui pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah	Bagian Ortala
		26 Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan, Evaluasi Jabatan & ABK	Mengetahui jumlah SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan dan ABK	Bagian Ortala
		27 Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui ULP	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	Bagian Perlengkapan
		28 Rasio Kebutuhan Pejabat/Panitia Pengadaan terhadap Jumlah Pengadaan Barang/Jasa	Mengetahui kebutuhan pejabat / panitia pengadaan	Bagian Perlengkapan
		29 Demo / protes terhadap PERDA/Perbup	Jumlah demo/protes terhadap perda/perbup	Satpol PP
		30 Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum	Perlunya regulasi yang mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP
		31 Jumlah Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Hibah yang dilaksanakan	Jumlah bantuan keuangan, bantuan sosial dan hibah yang diberikan	Bagian Adm. Kesra, Dinsos
		32 Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Bag. Adm Perekonomian
		33 Jumlah Unit Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah pengaduan pelayanan publik yg ditindaklanjuti	Bag. Ortala, Bag. Humas
		34 Jumlah Standarisasi Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang tersandarisasi	Bagian Ortala
		33 Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Mengetahui kebutuhan Satpol PP	Satpol PP

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Program Pemberdayaan Masyarakat yang berjalan	Jumlah program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat	Kantor PMD
		2 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa sesuai Pedoman	Kesesuaian pelaksanaan alokasi dana desa dengan pedomannya	Bag.Adm. Pemerintahan
		3 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan	Kantor PMD
		4 Jumlah Teknologi Tepat Guna	Jumlah teknologi tepat guna	Kantor PMD
		5 Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan	Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan	Kantor PMD
		6 Jumlah Sumberdaya Alam Desa yang diberdayakan	Sumberdaya alam desa yang diberdayakan	Kantor PMD
		7 Jumlah Lembaga Ekonomi Mikro yang dibina	Lembaga ekonomi mikro yang dibina	Kantor PMD
22	Sosial	1 Jumlah Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani	Jumlah PMKS yang tertangani	Dinas Sosial
		2 Jumlah Rumah Tangga Miskin	Pendataan jumlah Rumah Tangga Miskin	Dinas Sosial, Bag. Adm. Kesra, Bappelitbangda
23	Kebudayaan	1 Jumlah Budaya Khas Daerah yang dilestarikan	Jumlah budaya khas daerah	Disbudparpora
		2 Penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah seni dan budaya dipentaskan	Disbudparpora
		3 Peninggalan / Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan	Jumlah peninggalan/cagar budaya (situs)	Disbudparpora
24	Statistik	1 Keberadaan dokumen Gresik Dalam Angka	Kemudahan mencari data	Bappelitbangda
		2 Keberadaan dokumen PDRB	Kemudahan mencari data	Bappelitbangda
		3 Angka Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Perumusan kebijakan bidang ekonomi	Bappelitbangda
		4 Keberadaan dokumen IPM, Indeks Gini & IO	Kemudahan mencari data	Bappelitbangda
25	Kearsipan	1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Mengembangkan administrasi dan pengelolaan arsip daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip
26	Perpustakaan	1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah dan jenis buku pustaka yang tersedia	Kantor Perpustakaan dan Arsip
		2 Jumlah Perpustakaan yang dibina	Jumlah perpustakaan yang dibina	Kantor Perpustakaan dan Arsip
		3 Pengunjung perpustakaan	Minat baca masyarakat	Kantor Perpustakaan dan Arsip
		4 Jumlah anggota perpustakaan	Jumlah anggota perpustakaan dibanding pengunjung perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip
27	Kelautan dan Perikanan	1 Meningkatnya jumlah Potensi sumberdaya kelautan yang dimanfaatkan	Mengetahui potensi sumberdaya kelautan yang dimanfaatkan	Dinas Kelautan & Perikanan
		2 Jumlah Patroli Pengamanan Wilayah	Keamanan wilayah laut	Dinas Kelautan & Perikanan
		3 Jumlah Produksi Ikan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	Dinas Kelautan & Perikanan
		4 Jumlah Produksi Budidaya perikanan	Jumlah produksi budidaya perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
28	Pertanian	1 Meningkatnya jumlah Komoditas Pertanian	Jumlah komoditas pertanian	Dispertahutbun
		2 Meningkatnya Produksi Budidaya Pertanian	Jumlah produksi budidaya pertanian	Dispertahutbun
		3 Luas Lahan Pertanian Produktif	Mengetahui potensi kemampuan swasembada pangan	Dispertahutbun
		4 Jumlah Varietas Produk Unggulan Pertanian	Jumlah varietas produk unggulan pertanian	Dispertahutbun
29	Kehutanan	1 Luas Lahan Hutan Rakyat	Jumlah luas lahan hutan rakyat	Dispertahutbun
		2 Rehabilitasi Hutan	Mengetahui jumlah lahan kritis yang direboisasi	Dispertahutbun
30	Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Jumlah Energi Sumberdaya Mineral yang sudah dieksplorasi	Jumlah eksplorasi sumberdaya mineral	Bag. Adm SDA
		2 Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Energi	Mengetahui efektifitas kebijakan pemanfaatan energi	Bag. Adm SDA

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
		3 Meningkatkan Jumlah Bagi Hasil Migas	Peningkatan bagi hasil migas	Bag. Adm SDA, DPPKAD
31	Pariwisata	1 Jumlah Potensi Pariwisata yang diberdayakan	Mengetahui jumlah potensi pariwisata dan pariwisata yang telah diberdayakan	Disbudparpora
		2 Jumlah Kunjungan Wisatawan	Mengetahui jumlah kunjungan	Disbudparpora
		3 Meningkatkan Jumlah PAD sektor pariwisata	Mengetahui peningkatan PAD sektor pariwisata	Disbudparpora
32	Perindustrian	1 Meningkatkan Jumlah Industri Kecil & Menengah	Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah	Diskoperindag UKM
		2 Jumlah Produksi Industri Kecil & Menengah	Jumlah produksi industri kecil & menengah	Diskoperindag UKM
		3 Pertumbuhan Nilai Produksi	Mengetahui pertumbuhan nilai produksi	Diskoperindag UKM, BPMP
33	Perdagangan	1 Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	Mengetahui rata-rata pertumbuhan PDRB	Diskoperindag UKM, BPMP
		2 Meningkatkan Komoditas yang diekspor	Peningkatan jumlah komoditas yang diekspor	Diskoperindag UKM, BPMP

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si**

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
----	--------	-------------------------	--------	-------------

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
----	--------	-------------------------	--------	-------------

|